



INFORMASI INDIKATOR KINERJA

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN JAKARTA**

TAHUN 2024

PENGANTAR

Informasi Indikator Kinerja (IIK) / manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. IIK ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan.

Dokumen IIK ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Jakarta, Januari 2024

AKHMADON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		ISK.1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK.1.3.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100%
		ISK.1.3.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK.2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	ISK.2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100%
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK.3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	ISK.3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK.4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK.4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.2	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75
		ISK5.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100%
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	82
		ISK5.1.5	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	84

		ISK5.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		ISK5.1.7	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	21
		ISK5.1.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Jakarta (inovasi)	1
		ISK5.1.9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	70
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	94
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
		ISK5.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
		ISK5.1.13	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	93,76
		ISK5.1.14	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	82

INDIKATOR KINERJA 1

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)**

- 2. DESKRIPSI** :
- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);
 - Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Jakarta
 - Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.
 - Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:
 - a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
 - b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.
-

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$x = \frac{(a + b + c)}{100}$$

Keterangan:

- x* : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)
a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)
b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)
c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)
-

4. SATUAN

: Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6. SUMBER DATA	:	a. LAPORAN SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS			
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi			
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)**

- 2. DESKRIPSI** :
- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
 - Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
 - Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
 2. Cakupan wilayah pengawasan;
 3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

i_{kp} = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%
-

8. POLARISASI : Maximize Rata-rata Nilai Posisi Akhir

9. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Komponen Pembentuk Buat Baru

INDIKATOR KINERJA 3

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)**

- 2. DESKRIPSI** :
- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
 - Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
 - Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
 2. Cakupan wilayah pengawasan;
 3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.
-

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

-
1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.
 2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
 3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
 4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

4. SATUAN	:	Indeks	
5. TINGKAT VALIDITAS	:	(√) Output Kendali Tinggi	() Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER	:	Laporan Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas 2024	

7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)**

- 2. DESKRIPSI** :
1. Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil.
 2. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan.
 3. Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.
 4. Armada pengawasan dimaksud adalah Kapal Pengawas.
 5. Kegiatan Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan dilaksanakan oleh UPT PSDKP.
 6. Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan
 7. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan
 8. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan
 9. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan
 10. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan
 11. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan

PENJELASAN PENCAPAIAN IKU

1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan **Berita Acara Akhir Bulan** setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :
 - Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat *standby* di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;
-

-
- Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
 3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maximal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI**. Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.
-

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X_p = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

- x_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
- x_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
- x_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
- x_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)

xe : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)

xf : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

**Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*

**Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

4. SATUAN : %

5. TINGKAT VALIDITAS : () Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome

6. SUMBER :

- a. Berita Acara BBM Akhir Bulan.
- b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas.
- c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura.
- d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih.
- e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer.
- f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api.

7. POLA PERHITUNGAN : () Akumulasi (√) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : (√) Maximize () Minimize () Stabilize

9. PERIODE PELAPORAN : () Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
2. DESKRIPSI	:	<p>Prasarana Pengawasan SDKP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prasarana Pengawasan Utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan operator, rumah penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serba guna, dermaga)2. Prasarana Pengawasan pendukung (gedung ibadah, garasi speedboat, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, tempat parkir, pagar lingkungan, taman, drainase) <p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Progres pembangunan merupakan persentase penyelesaian pembangunan konstruksi.2. Pelaksanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP pada tahun 2023 memiliki target penyelesaian 100%.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $P_{Pras} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>P Pras = Persentase penyelesaian pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi (%)</p> <p>a = Progres pelaksanaan pengadaan pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi (%)</p> <p>b = Target progress pelaksanaan pengadaan pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi (%)</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas/supervisi dan dokumen pembayaran
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.• Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 30 (tiga puluh) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 90 (sembilan puluh) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat) [d disesuaikan dengan jumlah unit/asset masing-masing Satker].• Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">a. perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%),b. perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %)c. perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$Xp = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:*Xp = Persentase Perawatan Sarana**xa = Preventive**xb = Predictive**xc = Darurat*

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

FORM
NAMA KAPAL
BULAN

: PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP
: KAPAL PENGAWAS
: 2024

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
I	PERAWATAN PREVENTIF (50)			100	50	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	12	12	100		Laporan harwat rutin bulanan
2	Pengedokan atau pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan tahunan
3	Servis/perbaiki	1	1	100		Laporan perbaikan berkala
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis Teknis
5	Pengecekan Kondisi teknis kapal	12	12	100		Laporan Kondisi Teknis Bulanan
II	PERAWATAN PREDIKTIF (40)			100	40	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul (apabila tidak terdapat kegiatan overhaul, dianggap tercapai)
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi (apabila tidak terdapat kegiatan kalibrasi, dianggap tercapai)
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang

4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering
III	PERAWATAN DARURAT (10)			100	10	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
TOTAL CAPAIAN (%)				100	100	

DAFTAR ARMADA KAPAL PENGAWAS 2024

No	Kapal Pengawas	Class	No	Kapal Pengawas	Class	No	Kapal Pengawas	Kelas
Direktorat POA			Pangkalan PSDKP Batam			Pangkalan PSDKP Bitung		
1	KP. Orca 01	I	1	KP. Hiu Macan 05	III	1	KP. Hiu 02	IV
2	KP. Orca 02	I	2	KP. Hiu 03	IV	2	KP. Hiu 05	IV
3	KP. Orca 03	I	3	KP. Hiu 17	III	Stasiun PSDKP Tarakan		
4	KP. Orca 04	I	Pangkalan PSDKP Jakarta			1	KP. Hiu 07	IV
5	KP. Hiu Macan Tutul 01	II	1	KP. Hiu 06	IV	Stasiun PSDKP Tahuna		
6	KP. Hiu Macan Tutul 02	II	2	KP. Hiu 10	IV	1	KP Hiu 15	III
7	KP. Paus 01	II	Stasiun PSDKP Cilacap			Stasiun PSDKP Kupang		
8	KP. Akar	V	1	KP. Hiu 04	IV	1	KP. Hiu Macan 03	III
Pangkalan PSDKP Lampulo			Stasiun PSDKP Pontianak			Stasiun PSDKP Ambon		
1	KP Hiu 12	III	1	KP. Hiu Macan 01	III	1	KP. Hiu 13	III
Stasiun PSDKP Belawan			2	KP. Hiu 11	III	Pangkalan PSDKP Tual		
1	KP. Hiu 01	IV				1	KP. Hiu Macan 06	III
2	KP. Hiu 08	IV				2	KP. Hiu 14	III
3	KP. Hiu 16	III				Stasiun PSDKP Biak		
						1	KP. Hiu Macan 04	III

DAFTAR ARMADA SPEEDBOAT PENGAWAS 2024

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
A. Pangkalan PSDKP Batam				
1	Dolphin 08	8m	Bensin	Siap
2	Dolphin 15	8m	Bensin	Siap
3	Dolphin 18	8m	Bensin	Siap
4	Dolphin 23	8m	Bensin	Siap
5	Dolphin 24	8m	Bensin	Siap
6	Napoleon 15	12m	Bensin	Siap
7	Napoleon 16	12m	Bensin	Siap
8	Napoleon 27	12m	Solar	Siap
9	Napoleon 35	12m	Solar	Siap
10	Speedboat PRL 8m	12m	Bensin	Siap
11	RIB/Sea Rider X-8	RIB	Bensin	Siap
12	Rubber Boat Wilker Bangka	RUBBER	Bensin	Siap
13	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
14	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
B. Pangkalan PSDKP Benoa				
15	Dolphin 28	8m	Bensin	Siap
16	Napoleon 07	12m	Bensin	Siap
17	Napoleon 23	12m	Solar	Siap
18	Napoleon 53	12m	Solar	Siap
19	Rubber Boat (Benoa)	RUBBER	Bensin	Siap
20	Rubber Boat (Jembrana)	RUBBER	Bensin	Siap
C. Pangkalan PSDKP Bitung				
21	Albacore 01	16m	Bensin	Siap
22	Dolphin 03	8m	Bensin	Siap
23	Dolphin 19	8m	Bensin	Siap
24	Dolphin 26	8m	Bensin	Siap
25	Napoleon 30	12m	Solar	Siap
26	Napoleon 31	12m	Solar	Siap
27	Napoleon 56	12m	Solar	Siap
28	RHIB/Sea Rider 06	RIB	Bensin	Siap
29	Rubber Boat Bone	RUBBER	Bensin	Siap
30	Rubber Boat Kendari	RUBBER	Bensin	Siap
31	Rubber Boat Luwuk Banggai	RUBBER	Bensin	Siap
32	Rubber Boat Takalar	RUBBER	Bensin	Siap
33	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	RUBBER	Bensin	Siap
34	Rubber Boat Selayar	RUBBER	Bensin	Siap
35	Rubber Boat Wakatobi	RUBBER	Bensin	Siap
36	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
D. Pangkalan PSDKP Jakarta				
37	Dolphin 04	8m	Bensin	Siap
38	Napoleon 06	12m	Bensin	Siap
39	Napoleon 14	12m	Bensin	Siap
40	Napoleon 52	12m	Solar	Siap
41	Sea Rider/RIB	RIB	Bensin	Siap
42	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
43	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
E. Pangkalan PSDKP Lampulo				
44	Dolphin St. BL 01	8m	Bensin	Siap
45	Kakap	8m	Bensin	Siap
46	Napoleon 36	12m	Solar	Siap
47	Napoleon 45	12m	Solar	Siap
48	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
F. Pangkalan PSDKP Tual				
49	Albacore 02	16m	Bensin	Siap
50	Marlin 14	6,5m	Bensin	Siap
51	Napoleon 18	12m	Bensin	Siap
52	Napoleon 25	12m	Solar	Siap
53	Napoleon 42	12m	Solar	Siap
54	Napoleon 49	12m	Solar	Siap
55	Napoleon 50	12m	Solar	Siap
56	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
57	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
58	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap
59	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap
G. Stasiun PSDKP Ambon				
60	Napoleon 40	12m	Solar	Siap
61	Napoleon 51	12m	Solar	Siap
62	Napoleon 55	12m	Solar	Siap
63	Tenggiri	8m	Bensin	Siap
H. Stasiun PSDKP Belawan				
64	Dolphin 14	8m	Bensin	Siap
65	Napoleon 28	12m	Solar	Tidak Siap
I. Stasiun PSDKP Biak				
66	Dolphin 16	8m	Bensin	Siap
67	Napoleon 041	12m	Bensin	Tidak Siap

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
J. Stasiun PSDKP Cilacap				
68	Dolphin 29	8m	Bensin	Siap
69	Marlin 03	6,5m	Bensin	Siap
70	Marlin 09	6,5m	Bensin	Siap
71	Napoleon 12	12m	Bensin	Siap
72	Napoleon 33	12m	Solar	Siap
73	Napoleon 34	12m	Solar	Siap
74	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
75	Rubber Boat Karimunjawa	RUBBER	Bensin	Siap

K. Stasiun PSDKP Kupang				
76	Napoleon 54	12m	Solar	Siap
77	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
78	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

L. Stasiun PSDKP Pontianak				
79	Napoleon 03	12m	Bensin	Siap
80	Napoleon 37	12m	Solar	Siap
81	Napoleon 38	12m	Solar	Siap
82	RIB/Sea Rider 05	RIB	Bensin	Siap
83	Speed Boat TB.01	8m	Bensin	Siap

M. Stasiun PSDKP Tahuna				
84	Napoleon 17	12m	Bensin	Siap
85	Napoleon 39	12m	Solar	Siap
N. Stasiun PSDKP Tarakan				
86	Dolphin 17	8m	Bensin	Siap
87	Marlin 05	6,5m	Bensin	Siap
88	Marlin 07	6,5m	Bensin	Siap
89	RIB/Sea Rider X-03	RIB	Bensin	Siap
90	RIB/Sea Rider X-09	RIB	Bensin	Siap
91	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks		
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta		
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)**

2. DESKRIPSI :

1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan
2. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan.
3. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

x_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Contoh :

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS : () Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome

6. SUMBER DATA :
• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta
• Data Pelaku Usaha (OSS)

7. POLA PERHITUNGAN : () Akumulasi (√) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : (√) Maximize () Minimize () Stabilize

9. PERIODE PELAPORAN : () Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)**

2. DESKRIPSI :

1. Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
2. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi
3. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

X_{intl} : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

a : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan

b : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan

4. SATUAN INDIKATOR

%

5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
-----------------------------	---	---	--	----------------------------------

6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Laporan pengamatan/ penyurupan/ penyusupan/ penelitian/ penjejukan• Hasil Pulbaket• • Laporan masyarakat
-----------------------	---	--

7. POLA PERHITUNGAN		<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
----------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	--

8. POLARISASI		<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
----------------------	--	--	-----------------------------------	------------------------------------

9. PERIODE PELAPORAN		<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
-----------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

INDIKATOR KINERJA 9

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)**

2. DESKRIPSI :

1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan
2. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.
3. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

3. POLA PERHITUNGAN

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- X_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Contoh :

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS IK : () Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome

6. SUMBER DATA : • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta
• Data Pelaku Usaha (OSS)

7. POLA PERHITUNGAN : () Akumulasi (√) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : (√) Maximize () Minimize () Stabilize

9. PERIODE PELAPORAN : () Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)**

2. DESKRIPSI :

- Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha adalah perbandingan nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa.
- Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental

2. DESKRIPSI :

- Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
- Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

X_{intl} : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan

a : jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang selesai dikumpulkan

b : jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang ditargetkan dikumpulkan

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah		
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengamatan/ penyurupan/ penyusupan/ penelitian/ penjejakan • Hasil Pulbaket Laporan masyarakat 			
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	<input type="checkbox"/> Tahunan
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. INDIKATOR KINERJA

: **Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)**

2. DESKRIPSI

- : Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan peneanaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:
- a) Dit. PP (Pusat) untuk peneanaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
 - b) Dit. PP untuk peneanaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
 - c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
 - d) UPT PSDKP untuk peneanaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
 - e) UPT PSDKP untuk peneanaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
-

3. FORMULA PERHITUNGAN

Indeks Peneanaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut

Indeks Peneanaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

x : Indeks peneanaan sanksi administratif bidang KP

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**

2. DESKRIPSI :

- Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula :

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_n)}{n} \times 100\%$$

x_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;

$x_{n..}$: Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;

n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

4. SATUAN

: Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6. SUMBER DATA	:	Form Pemeriksaan Hasil Pemantauan			
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)**

2. DESKRIPSI : Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)

3. FORMULA PERHITUNGAN Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b}\right) \times 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

CATATAN TAMBAHAN:

- Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.
 - Apabila terdapat kasus yang di biyai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di *claim* sebagai capaian unit kerja yang mebiyai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
-

- Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3.
7. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)
2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan: U1-Persyaratan Layanan U2-Kemudahan Prosedur U3- Waktu Penyelesaian U4-Kesesuaian Biaya U5-Kesesuaian Produk U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas U8-Layanan Konsultasi U9-Kualitas Isi/Sarana Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut: >88,31 : Sangat Baik 76,61-88,30: Baik 65,00-76,60: Kurang Baik 25,00-64,99 : Tidak Baik

	Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)		
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%	
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input checked="" type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN	
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)**

2. DESKRIPSI : Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

**3. FORMULA
PERHITUNGAN**

Kriteria:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
 4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.
-

4. SATUAN PENGUKURAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output Kendali Tinggi Output Kendali Rendah Outcome

6. SUMBER DATA : Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal

7. POLA PERHITUNGAN : Akumulasi Rata-rata Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : Maximize Minimize Stabilize

9. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)**

2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

4. SATUAN	:	%			
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko			
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)**

2. DESKRIPSI :

- Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;
- Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:
- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:
- Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)
- Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
 - b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
 - c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
 - d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
 - e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)

INDIKATOR KINERJA 18

1. INDIKATOR KINERJA : **Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)**

2. DESKRIPSI :

- a. Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi
- b. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja
- c. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:
 - Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
 - Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
 - Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

3. FORMULA PERHITUNGAN

CARA PENGUKURAN CAPAIAN

$$SKOR_{REKON} = \text{Nilai kepatuhan} + \text{Nilai kesesuaian} + \text{Nilai ketercapaian}$$

Nilai Kepatuhan:

$$Nilai_{kepatuhan} = 30\% \times \frac{\text{Dokumen yang ada}}{\text{Total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$$

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Perjanjian Kinerja
2. Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja
3. Rincian Target IKU
4. Rencana Aksi
5. LKJ/LCK
6. Data Dukung LKJ/LCK

Nilai Kesesuaian:

$$Nilai_{kesesuaian} = 30\% \times \frac{\text{Nilai kriteria dokumen yang disandingkan}}{\text{Total dokumen yang disandingkan}}$$

Kriteria dokumen yang disandingkan:

Target:

- A. PK – LKJ/LCK
-

- B. LKJ/LCK – Kinerja
- C. PK – Kinerja
- Realisasi:
- D. LKJ/LCK TW I – Kinerja
- E. LKJ/LCK TW II – Kinerja
- F. LKJ/LCK TW III – Kinerja
- Informasi data:
- G. Manual IKU – Kinerja
- H. Rincian Target – Kinerja

Nilai Ketercapaian:

$$Nilai_{ketercapaian} = 40\% \times \frac{\text{Rata – rata NPSS triwulanan}}{120} \times 100$$

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	Lembar Kerja Evaluasi UPT Pangkalan PSDKP Jakarta
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)		
2. DESKRIPSI	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.		
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP		
4. SATUAN	:	%		
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • UPT Pengawasan SDKP Jakarta 		
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. INDIKATOR**Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)**

2. DESKRIPSI

- Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
- Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
- Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:
 1. Tim Satker (6)
 2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
 3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
 4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
 5. Upayakan Data Terkini (2)
 6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
 7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
 8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
 9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
 12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$N = \sum n$$

 N = Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT Pangkalan PSDKP Jakarta n = Unsur Budaya Kerja yang dinilai (terdiri dari 12 unsur)

4. SATUAN	Nilai			
5. TINGKAT VALIDITAS	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6. SUMBER DATA	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja			
7. POLA PERHITUNGAN	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta (Inovasi)
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat konteks Jakarta baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik NegaraKriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutanKelompok inovasi: umum, khususAspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan
3. FORMULA PERHITUNGAN		Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP
4. SATUAN	:	Inovasi
5. TINGKAT VALIDITAS	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	Inovasi UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)**

2. DESKRIPSI :

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
- Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

3. FORMULA PERHITUNGAN

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan

Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI	INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan > 90 - 100
A	Memuaskan >80 - 90
BB	Sangat Baik >70 - 80
B	Baik >60 - 70
CC	Cukup >50 - 60
C	Kurang >30 - 50
D	Sangat Kurang >0 - 30

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS : () Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome

6. SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ			
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23

1. INDIKATOR KINERJA	: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)
2. DESKRIPSI	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.• Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">○ Dokumen (20%: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian target IKU, Laporan Kinerja & Interim, Renaksi Kinerja;○ Keaktifan (80%): Pimpinan Unit Eselon I-Staf. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.• Pembobotan yang dimaksud antara lain :• Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W+1H mendapatkan poin 0,5;• Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;• Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.
3. FORMULA PERHITUNGAN	Cara Mengukur: a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (britrix) b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">•Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan•Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
4. SATUAN	: %
5. TINGKAT VALIDITAS	: (√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	: Sekretariat Ditjen PSDKP Aplikasi <i>Collaboration Office</i>

7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)			
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.			
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%			
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP			
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)			
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).			
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%			
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP			
7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 26

1. INDIKATOR KINERJA : **Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)**

2. DESKRIPSI : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
Target IKPA Tahun 2023 sebesar 89.00 (nilai)
Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

3. FORMULA PERHITUNGAN Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
 Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi bobot}$$

4. SATUAN : %

5. TINGKAT VALIDITAS : Output Kendali Tinggi Output Kendali Rendah Outcome

6. SUMBER DATA : Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)

7. POLA PERHITUNGAN : Akumulasi Rata-rata Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : Maximize Minimize Stabilize

9. PERIODE PELAPORAN

: Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

INDIKATOR KINERJA 27

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)**

- 2. DESKRIPSI** :
- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
 - Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
 - Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kerenan terian / Lembaga
 - Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
 - Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA
 - a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
 - Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)
 - Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian Output Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$CSP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I

RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKPi : Target Indikator Kinerja Program i

l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I

m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program

n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap sasaran program

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
Nilai Kinerja Satker		Total

4. SATUAN PENGUKURAN : %

5. TINGKAT VALIDITAS : (√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome

6. SUMBER DATA : Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan

7. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
